

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bagi banyak komunitas Islam di Indonesia, agama bukan sekadar keyakinan spiritual, ia merupakan fondasi identitas, jalinan sosial, serta wadah mobilisasi kolektif. Di tengah dinamika politik kontemporer, ormas-ormas Islam kadang menjadi jembatan antara dunia dakwah dan dunia politik. Perlu dicatat peran penting ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan PERSIS dalam lanskap ini. Walaupun partai-partai islam elektoral melemah, partai-partai keagamaan tetap merupakan aktor sosial-kultural yang kuat. Mereka menguasai jaringan pendidikan, dakwah dan sosial yang besar dan berpengaruh.

Literatur politik memperlihatkan bahwa ormas sering menjadi saluran penguatan agenda Islam di ruang publik tanpa melebur secara langsung menjadi kendaraan partai.¹ Peranan ormas inilah yang menjelaskan mengapa wacana Islam tetap kuat dalam politik praktis meskipun partai Islam formal tidak selalu memperoleh dukungan elektoral besar. Dengan kata lain, pengaruh Islam dalam politik lebih bersifat '*societal mobilization*' melalui ormas ketimbang monopoli suara melalui partai-partai islam.

Sejak era Reformasi 1998, peta partai politik di Indonesia mengalami dinamika signifikan. Munculnya banyak partai pasca Orde Baru membawa

¹ Cut Maya Husna. Islam politik dan ruang publik: Relasi negara, ormas Islam dan kesadaran sosial. Ibtikar: Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol 2 No. 1, Juni (2025), hlm.26; Putri, A. The roles of Islamic organizations in civil society and political society: Malaysia and Indonesia compared. Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities. Journal Of Indonesian Social Sciences And Humanities (Jissh), Vol. 6, Issue 2, (2016), hlm.36.

peluang bagi partai berbasis Islam untuk berebut suara, namun pada level elektoral partai-partai Islam tidak lagi menunjukkan dominasi seperti pada era 1955.² Berdasarkan data KPU (2024), perolehan suara partai-partai Islam salah satunya PBB (Partai Bulan Bintang)³ mengalami fluktuasi, jauh di bawah ambang batas parlemen 4%. Jika melihat tren hasil pemilu dari waktu ke waktu, suara PBB menunjukkan kecenderungan menurun. Pada Pemilu 2009, PBB masih mampu meraih sekitar 1,79 persen suara nasional.⁴ Lima tahun kemudian, pada Pemilu 2014, dukungan tersebut turun menjadi sekitar 1,46 persen. Penurunan ini berlanjut pada Pemilu 2019 ketika PBB hanya mendapatkan sekitar 0,79 persen suara.⁵ Puncaknya terjadi pada Pemilu 2024, di mana hasil rekapitulasi resmi menunjukkan bahwa PBB hanya memperoleh sekitar 0,32 persen suara, atau setara dengan kurang lebih 484.486 pemilih di seluruh Indonesia.⁶

Sebenarnya target PBB pada Pemilu 2019 sempat cukup ambisius, yakni menargetkan 6 persen suara nasional menurut pernyataan Ketua

² Dahlan, M. *Partai Islam di era Reformasi*. ALLIRI Journal of Anthropology. Alliri: Journal of Anthropology Volume 5 (2) Desember 2023, hlm.7; Zulian, P. B., & Hayati, N. N. (2024). Bleak future for Islamic parties in Indonesia after the 2024 election. ISEAS-Yusof Ishak Institute, (2024) hlm. 3.

³ Partai Bulan Bintang (PBB) didirikan pada masa awal Reformasi, tepatnya pada 17 Juli 1998, sebagai partai politik Islam yang merujuk pada warisan pemikiran dan perjuangan Partai Masyumi. PBB memandang Islam sebagai sumber nilai moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memperjuangkannya melalui jalur demokrasi dan konstitusional. Dalam perjalanannya, PBB mengalami dinamika dan pasang surut elektoral, namun tetap bertahan melalui jaringan kultural dan basis lokal, termasuk di Kota Tasikmalaya.

⁴ Kurnia Yunita Rahayu. *PPP dan kisah sejumlah parpol yang tersisih dari parlemen [Hasil suara parpol 2009s.d.2019]*. Kompas.id. (23 Mar 2024) <https://www.kompas.id/artikel/ppp-dan-kisah-sejumlah-parpol-yang-tersisih-dari-parlemen>. (Diakses pada 20 Des 2025)

⁵ Muhammad Zaenuddin. *Perbandingan suara partai politik pada Pemilu 2014 dan 2019*. Kompas.com. (14 Feb 2024) <https://www.kompas.com/tren/read/2024/02/14/084500765/perbandingan-suara-partai-politik-pada-pemilu-2014-dan-2019> (Diakses pada 20 Des 2025)

⁶ Margith Juita Damanik. Perbedaan perolehan suara parpol Pemilu 2024 dan 2019. IDN Times. (21 Mar 2024) <https://www.idntimes.com/news/indonesia/perbedaan-perolehan-suara-partai-di-pemilu-2024-dan-2019-00-l8sw-n-qhp4m8> (Diakses pada 20 Des 2025)

Komite Aksi Pemenangan Pemilu PBB.⁷ Karena hasil yang jauh di bawah target tersebut, muncul pembacaan bahwa PBB kehilangan daya tarik elektoral meskipun memiliki landasan ideologis yang kuat dalam Islam modernis. Kesamaan ideologi di sini bukan dipahami sebagai kesepakatan politik formal, tapi sebagai nilai yang sudah mengendap secara kultural. Ideologi itu tidak hadir sebagai agenda atau garis organisasi, melainkan sebagai cara berpikir, selera moral dan kebiasaan sosial. Fenomena ini secara langsung menunjukkan bahwa daya tarik politik Islam modernis di tingkat nasional menurun. Itu artinya partai-partai yang secara eksplisit menempatkan isu Islam sebagai basis utama cenderung memiliki perolehan suara rendah dan marginal secara nasional. Sementara partai yang lebih pragmatis dan *clientelistic*, atau partai berbasis nasionalisme sekuler, lebih banyak menguasai kursi parlemen.

Apalagi Pemilu 2024 memperkuat kesan bahwa partai-partai Islam tradisional berada dalam posisi yang menantang. Analisis dan kajian kontemporer menyebutkan bahwa hasil 2024 memunculkan pertanyaan serius tentang masa depan partai-partai Islam arus utama yang semakin terdorong ke pinggiran arena politik elektoral nasional.⁸ Beberapa kajian lembaga riset menunjukkan bahwa kombinasi faktor struktural (perubahan aturan elektoral, ketidakstabilan pemilih), kelembagaan (perpecahan

⁷ Sri Muryono. PBB targetkan enam persen suara di Pemilu 2019. Antara News. (30 Nov 2018) <https://www.antaranews.com/berita/773359/pbb-targetkan-enam-persen-suara-di-pemilu-2019> (Diakses pada 20 Des 2025).

⁸ Indriani, N. D. (2025). *Perkembangan Demokrasi: Studi Komperasi Pertarungan Partai Islam Pada Pemilu 2024*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 5 No 2 (Desember 2025), hlm. 160; Wahidin, D. T. S., dkk (2025). *Partai Islam Dan Pemilu 2024*. PARAPOLITIKA Journal of Politics and Democracy Studies (JPDS) Volume 6 Nomor 1 (September-Februari 2025), hlm. 26.

internal) dan strategi kampanye (Politik berorientasi keuntungan) menjadi penyebab menurunnya daya tarik partai Islam dalam bentuk partai politik formal.⁹

Fenomena ini disertai dua perkembangan penting. Pertama, melemahnya program ideologis, dimana banyak partai yang secara historis menaruh basis pada agenda agama mengalami kesulitan mentransformasikan nilai-nilai ideologis ke program politik yang konkret dan menarik bagi pemilih luas.¹⁰ Kajian akademik menyoroti ketidakmampuan partai-partai Islam mengubah modal keagamaan menjadi platform politik yang kompetitif, sehingga pemilih Islam cenderung terbagi atau beralih ke partai lain berdasarkan figur, jaringan, atau imbalan material.¹¹

Kedua, politik pragmatis dan politik identitas semakin menonjol.¹² Politik identitas yaitu pemanfaatan isu agama, etnis, atau simbol identitas untuk memobilisasi dukungan muncul kembali sebagai strategi kampanye yang efektif dalam konteks kompetisi elektoral yang ketat. Meski demikian, penggunaan politik identitas tidak selalu berujung pada peningkatan suara untuk partai Islam formal. Identitas sering dieksploitasi

⁹ Nurjaman, A. (2025). *The decline of Islamic parties and the dynamics of the party system in post-Suharto Indonesia*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP)*. Vol. 27, No. 2, (Nov 2023), hlm. 194.

¹⁰ Wahyudi, J. (2025). Pudarnya ideologi partai Islam pascareformasi: Telaah atas perjalanan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak Pemilu 2009s.d.2019. *Politea: Journal of Political Science*. Vol. 5, No. 1 (2022), hlm. 112; Nurhuda, A., Fajri, S., & Hidayat, T. (2025). From social majority to political minority: The stagnation of Islamic parties in Indonesia. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*. Vol. 12, No. 1 (2025), hlm. 61.

¹¹ Nurjaman, A. (2023). *The decline of Islamic parties and the dynamics of the party system in post-Suharto Indonesia*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP)*. Vol. 27, No. 2, (Nov 2023), hlm. 200.

¹² Yunus, F. M., Yasin, T. H. M., & Rijal, S. (2023). *Politik identitas dan politisasi agama dalam konteks pemilu di Indonesia*. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, Vol. 9 No. (2 September 2023), hlm.131; Hamidah, K. (2025). *The trend of emerging identity politics in Indonesia and the challenge in fostering social cohesion: Lesson learned from Jakarta provincial election*. *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, Vol. 26 No.1 (June 2018), hlm. 941.

oleh aktor politik lintas partai untuk tujuan elektoral jangka pendek. Kajian tentang praktik politik identitas menjelang Pemilu 2019 dan 2024 menunjukkan bagaimana isu identitas digunakan dalam narasi kampanye dan media sosial, memperkuat polarisasi tetapi tidak otomatis memperkuat partai Islam tradisional.¹³

Kota Tasikmalaya adalah salah satu ruang sosial yang merepresentasikan fenomena tersebut. Di Kota Tasikmalaya, berdasarkan data resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk per semester I tahun 2025 tercatat 773.692 jiwa,¹⁴ menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki basis demografis yang cukup besar untuk aktivitas sosial-keagamaan dan politik lokal, serta agama Islam masih mendominasi secara mayoritas, meskipun angka spesifik persentase tiap tahun tidak selalu terpublikasi lengkap. Dari sisi organisasi kemasyarakatan, data dari Kesbangpol Kota Tasikmalaya memperlihatkan bahwa jumlah ormas di kota ini terus meningkat, misalnya pada 2023 tercatat sebanyak 512 organisasi.¹⁵ Kondisi ini memperkuat asumsi bahwa wilayah Tasikmalaya merupakan arena yang relevan bagi ormas Islam

¹³ Munandar, M. A., Suyahmo, & Suhardiyanto, A. (2019). Identity politics in Social Media in the 2019 Presidential Election. In *Proceedings of the 1st International Symposium on Indonesian Politics (ISIP 2019)*. (June, 2023), hlm.3; Abdul Majid & Amirulkamar. (2025). Identity Politics Approaching the 2024 Election through Social Media Through Sociology of Religion Perspective. *Journal of Governance and Public Policy*. Vol 10, No 3 (2023), hlm. 277; Asikin, M. Z. (2025). Identity Politics and Social Fragmentation: A Comparative Study of Indonesia's 2024 Presidential Candidate Campaign Narratives. *Journal of Political Innovation and Analysis*. Volume 2 No 1, (Januari 2025), hlm.24.

¹⁴ Disdukcapil Kota Tasikmalaya. *Data Agregat Kependudukan (DKB) Kota Tasikmalaya Semester I 2025. Sistem Informasi Manajemen Statistik Kependudukan (SIMANTAP)*. (2025). <https://gis-disdukcapil.tasikmalayakota.go.id/public/dtsen2025> (Diakses pada 20 Des 2025)

¹⁵ Kesbangpol Kota Tasikmalaya. *Data organisasi kemasyarakatan di Kota Tasikmalaya 2017-2024*. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya. (2025). <https://kesbangpol.tasikmalayakota.go.id/data-organisasi-kemasyarakatan/> (Diakses pada 20 Des 2025).

seperti PERSIS (Persatuan Islam) dan Partai Islam yakni PBB untuk beroperasi dan memiliki pengaruh. Di sini, hubungan antara PERSIS dan PBB pernah diyakini sebagai ikatan yang bukan sekadar organisatoris, tetapi juga kultural dan emosional.

Relasi kultural tidak selalu lahir dari ketimpangan, tidak pula selalu tumbuh dari logika siapa yang lebih kuat dan siapa yang harus mengikuti. Dalam banyak konteks sosial dan politik, relasi kultural justru bergerak di ruang yang lebih sunyi yakni ruang perjumpaan nilai, ingatan kolektif dan kesamaan orientasi yang dinegosiasikan secara perlahan. Berbeda dengan relasi kuasa yang ditandai oleh hierarki, pemaksaan dan dominasi struktural, relasi kultural berdiri di atas pengakuan timbal balik bahwa masing-masing pihak memiliki identitas, sejarah dan otoritas moral yang sama-sama sah. Ronald L. Jackson II, melalui *Cultural Contracts Theory*, menjelaskan bahwa hubungan antar entitas budaya dapat berkembang dalam bentuk *co-created contracts*,¹⁶ yakni kondisi ketika dua pihak secara sadar merundingkan cara berelasi, menyesuaikan ekspektasi dan menyepakati batas serta arah interaksi tanpa harus meniadakan identitas satu sama lain. Pada titik ini, relasi kultural tidak bekerja sebagai mekanisme kontrol, melainkan sebagai ruang dialog yang memungkinkan kesetaraan relasional.

Pada masa awal Reformasi, kedekatan antara PERSIS dan PBB tampak natural. Keduanya berbagi akar sejarah pemikiran dengan Partai Masyumi. Dalam wawancara awal dengan salah satu Wakil Ketua DPC

¹⁶ Jackson, R. L. (2002). Cultural contracts theory: Toward an understanding of identity negotiation. *Communication Quarterly*. Vol. 50, No. 3 (Cite on 31 Jan. 2010), hlm. 362.

(Dewan Pimpinan Cabang) PBB Kota Tasikmalaya, Bapak Siddiq Abdullah, S.Pd. pada tanggal 29 November 2025, ia menyatakan bahwa:

“PBB memang melanjutkan cita-cita Masyumi. Jadi PERSIS punya tujuan yang sama dengan PBB bahwa Piagam Jakarta ingin disahkan. Bahkan, kalau bicara sejarah, PERSIS lah yang melahirkan PBB itu sendiri.”¹⁷

Pernyataan ini menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya tidak hanya bersifat praktis, melainkan berakar pada identitas ideologis bersama, khususnya mengenai visi Islam sebagai fondasi moral-politik masyarakat.

Dulu, kedekatan antara PERSIS dan PBB dianggap nyata, bahkan hampir menjadi identitas bersama bagi sebagian *jama'ah* dan kader PERSIS yang menempati posisi penting dalam lanskap keislaman lokal. Berdasarkan data direktori lembaga pendidikan yang terdaftar secara *online*, penulis mengidentifikasi setidaknya 23 pesantren dan madrasah yang berafiliasi dengan PERSIS di wilayah Kota Tasikmalaya. Entitas-entitas ini mencakup berbagai pesantren yang diberi nomor identifikasi dalam basis data, seperti Pesantren Persatuan Islam 157 dan PPI 300-318, serta lembaga pendidikan lain seperti Pesantren Persatuan Islam 67 Benda, Madrasah Aliyah Persis Cempakawarna dan Pesantren Persis 91 Bantargedang, yang secara jelas berlokasi di Kota Tasikmalaya.¹⁸

¹⁷ Wawancara Pribadi dengan Siddiq Abdullah, S.Pd., Wakil Ketua Khusus & Anggota Pemuda PERSIS (29 November 2025)

¹⁸ Yunandra Center. Lembaga pendidikan Persatuan Islam (Persis). (11 April 2021). <https://yunandracenter.com/lembaga-pendidikan-persis-persatuan-islam/> (Diakses pada 20 Des 2025); Pesantren Persatuan Islam 67 Benda. (n.d.). Info lembaga. <https://www.semuaabis.com/pesantren-persis-benda-0265-330006>. (Diakses pada 20 Des 2025); Pesantren Persis 91 Bantargedang. (n.d.). Profil lembaga. <https://id.worldorgs.com/katalog/tasikmalaya/sekolah-agama/pesantren-persis-91-bantargedang>. (Diakses pada 20 Des 2025).

Lembaga-lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga menjadi arena pembentukan opini dan diskursus sosial di tingkat masyarakat.

Para kader dan ulama muda PERSIS di Tasikmalaya aktif menyuarakan isu-isu moral, politik dan sosial melalui kajian, seminar, maupun dakwah digital.¹⁹ Dalam konteks ini, posisi PERSIS menarik untuk dikaji karena meskipun secara organisasi *jam'iyah* PERSIS tidak menyatakan afiliasi politik formal dan organisasi tidak terikat pada satu partai tertentu, sejumlah kadernya diketahui aktif di ruang politik lokal. Beberapa tokoh muda PERSIS di Tasikmalaya terlibat dalam kegiatan politik, baik sebagai caleg independen maupun simpatisan di PBB. Selain itu, muktamar PERSIS ke-16 di Bandung (2022) menegaskan pentingnya “peran sosial & politik umat Islam dalam kerangka dakwah *bil hal*,” yang artinya keterlibatan sosial & politik dipandang sah sejauh tidak mengorbankan prinsip keagamaan dan dakwah.²⁰

Sebagai contoh, Pimpinan Pusat Persis melalui Musyawarah Kerja tanggal 14-15 November 1998 mengambil sikap bahwa PERSIS tetap istiqamah tidak akan menjadi partai politik, dengan kata lain tetap sebagai organisasi dakwah dan bukan kendaraan politik langsung.²¹ Lebih lanjut, Ketua Umum PP PERSIS, KH Jeje Zaenudin, menegaskan pada tahun

¹⁹ Fawaz Raul Al Rusyid. IPP Kota Tasikmalaya gelar kajian INSAN: Integritas, spiritual dan keilmuan untuk kader muda Persis. Persis.or.id. (24 Aug 2025). <https://www.persis.or.id/News/read/ipp-kota-tasikmalaya-gelar-kajian-insan-integritas-spiritual-dan-keilmuan-untuk-kader-muda-persis> (Diakses pada 20 Des 2025).

²⁰ Laporan Muktamar PERSIS XVI. (2022). Tema dan Keputusan Muktamar Persatuan Islam. Bandung: Pimpinan Pusat PERSIS. <https://persis.or.id/news/read/mantapkan-kesuksesan-muktamar-xvi-pp-persis-lakukan-sosialisasi-dan-serap-aspirasi> (Diakses pada 20 Des 2025).

²¹ Anas, D. W., Khaeruman, B, Rahman, M. T., Awaludin, L. *Anatomi Gerakan Dakwah Persatuan Islam*. (Tangerang Selatan, Amana Publishing, 2015), hlm.191.

2023 bahwa PERSIS memilih untuk “menjaga jarak dengan semua partai politik” demi memprioritaskan keutuhan umat dan bangsa.²² Dari konteks tersebut, dapat disimpulkan bahwa PERSIS memiliki posisi unik sebagai ormas Islam yang menolak politik praktis secara formal, namun tetap memberikan ruang bagi kadernya untuk berperan dalam arena politik sebagai bagian dari dakwah sosial.

Karena memang dalam sejarah gerakan Islam modernis di Indonesia, tokoh seperti Mohammad Natsir memegang posisi strategis. Ia tercatat sebagai aktivis awal dari PERSIS, yang kemudian juga berkiprah dalam politik melalui partai politik Islam seperti Masyumi. Pengaruh pemikiran Natsir dan jaringan modernis Islam yang ia wakili kemudian menjadi bagian dari warisan ideologis yang diadopsi oleh PBB ketika partai tersebut berdiri pasca Reformasi.²³ Literatur menyebut bahwa PBB berada pada spektrum “Islam modernis” yang cukup dekat dengan tradisi ideologis PERSIS dan Masyumi.²⁴

Dengan demikian, penelitian ini penting bukan hanya untuk mengetahui apakah hubungan itu masih ada, tetapi untuk memahami bagaimana dan

²² Portal Persis. Prioritaskan keutuhan umat, PP PERSIS jaga jarak dengan semua partai politik. (21 Jun 2023), <https://www.persis.or.id/news/read/prioritaskan-keutuhan-umat-pp-persis-jaga-jarak-dengan-semua-partai-politik> (Diakses pada 20 Des 2025); Ahmad. Prioritaskan keutuhan umat, PP PERSIS jaga jarak dengan semua partai politik. Persis.or.id. (9 Jun 2023). <https://hidayatullah.com/berita/2023/06/09/252763/pp-persis-akan-menjaga-jarak-dengan-semua-partai-politik.html> (Diakses pada 20 Des 2025)

²³ Redaksi. *Biografi Mohammad Natsir: Tokoh Besar Pejuang Persatuan dan Pemikir Islam Indonesia*. (31 Jul 2025). Bisnis.com. https://kabar24.bisnis.com/read/20250731/15/1896466/biografi-mohammad-natsir-tokoh-besar-pejuang-persatuan-dan-pemikir-islam-indonesia#goog_rewarded. (Diakses pada 20 Des 2025); Portal Persatuan Islam (PERSIS). Mohammad Natsir. Persis.or.id. (11 Aug 2015). <https://persis.or.id/news/read/mohammad-natsir>. (Diakses pada 20 Des 2025).

²⁴ Nisa, K., Yusuf, K., & Basuki, S. N. (2025). Dari Masyumi ke Partai Bulan Bintang: Kontinuitas ideologi dan pengaruhnya dalam politik pemerintahan Indonesia. *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam*. Vol. 6, no. 1 (2025), hlm.3.

mengapa ia berubah. Penelitian ini berupaya menangkap hubungan yang bergerak, hubungan yang pernah hidup, kini berubah dan mungkin sedang membentuk pola baru yang belum terbaca. Seperti kata Granovetter (1973), *“jaringan sosial tidak hanya menjelaskan hubungan, tetapi bagaimana informasi, nilai dan pengaruh berpindah dan berubah.”*²⁵ Dengan menelusuri jaringan sosial, narasi kolektif dan ruang dakwah yang pernah mempertemukan PERSIS dan PBB, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman lebih luas mengenai dinamika hubungan agama, budaya dan politik di ruang lokal Indonesia.

Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas kajian hubungan ormas politik dengan perspektif historis & kultural yang masih jarang digunakan. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi cermin bagi aktor sosial, politik dan keagamaan dalam memahami bagaimana relasi sosial dibangun, dipertahankan dan dinegosiasikan di tengah perubahan zaman. Pada akhirnya, penelitian ini hadir karena ada cerita sosial yang tengah bergeser dan ilmu adalah upaya merekam perubahan sebelum ia hilang dari ingatan kolektif.

Selain itu, penelitian mengenai jaringan sosial keagamaan di Tasikmalaya juga masih terbatas, terutama yang menghubungkannya dengan perilaku politik dan transformasi relasi antar aktor lokal. Seperti yang terlihat dalam penelitian Muhammad Yaufi Nur Mutiullah (2024) mengenai kyai sebagai *cultural brokers* dalam relasi NU dan PKB. Penelitian tersebut menegaskan bahwa otoritas keagamaan dan jaringan

²⁵ Granovetter, M.S., (1973). *The strength of weak ties*. American Journal of Sociology. Vol. 78, No. 6 (May, 1973), hlm. 1371-1373.

pesantren masih berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mobilisasi politik umat. Namun, penelitian ini tidak mengeksplorasi bagaimana hubungan berbasis kultur tersebut dapat mengalami pelemahan dari waktu ke waktu.²⁶

Sebagian penelitian lain lebih fokus pada aspek perubahan pemikiran Islam,²⁷ transformasi politik Islam modernis dan moderasi ideologis partai Islam,²⁸ atau perubahan perilaku pemilih Muslim modern dari ideologis ke pragmatis (penelitian tahun 2019 tentang penurunan suara PBB). Meskipun studi-studi ini memberi kerangka penting mengenai bagaimana pemilih Muslim tidak lagi bergerak berdasarkan ideologi tunggal, penelitian-penelitian tersebut tidak menelaah bagaimana dinamika perubahan itu bekerja di tingkat lokal, terutama melalui jaringan sosial, ruang dakwah dan relasi ormas & partai politik berbasis sejarah bersama.

Sementara itu, penelitian tentang penerapan syariah di Cianjur²⁹ serta studi komparatif mengenai pembangunan identitas politik oleh PKS dan AKP (2023) menunjukkan bahwa politik Islam di Indonesia bukan hanya ranah partai formal, tetapi arena negosiasi identitas yang melibatkan simbol keagamaan, kepentingan aktor dan konteks lokal. Namun, penelitian-penelitian ini tidak mengkaji bagaimana hubungan historis ormas dan

²⁶ Mutiullah, M. Y. N. (2024). *Religion and Politics in Indonesia: The Role of Kyai in the 2024 Election, Case Study on Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)*: Afkaruna Journal. Vol. 20 No. (1 June 2024), hlm. 91-92.

²⁷ Aisah Putri. (2016). The roles of Islamic organizations in civil society and political society: Malaysia and Indonesia compared. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*. Vol. 6, No. 2. (2016).

²⁸ Mufti, M. (2023). *Redrawing the Diverse of Muslim Politics: Study on Political Attitude of Islamic Political Parties in Indonesia*. *Journal*. USHULUNA: JURNAL ILMU USHULUDDIN. Vol. 9, No. 2, (Desember 2023).

²⁹ Ikhwan, H., *FITTED SHARIA IN DEMOCRATIZING INDONESIA*. *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM*. Vol. 12, No. 1, (June 2018)

partai dapat berubah menjadi hubungan simbolik atau kultural tanpa bentuk dukungan elektoral eksplisit.

Pada sisi lain, penelitian yang berfokus pada jejaring sosial dalam partisipasi politik seperti studi kuantitatif mengenai peran jejaring sosial dalam meningkatkan *political engagement* generasi muda³⁰ dan penelitian komunikasi politik digital pada ormas Islam³¹ menunjukkan bahwa politik hari ini tidak lagi berlangsung melalui instruksi formal kelembagaan, tetapi melalui jaringan sosial keagamaan, komunikasi digital dan ruang opini publik virtual. Temuan ini menunjukkan bahwa relasi politik dapat berubah bentuk menjadi cair, lentur dan berbasis simbol, namun penelitian tersebut tidak secara spesifik menelusuri bagaimana perubahan ini mempengaruhi relasi antara ormas dan partai Islam yang memiliki sejarah identitas bersama.

Akhirnya, penelitian mengenai *de-existence* partai Islam³² menunjukkan bahwa melemahnya partai Islam tidak berarti hilangnya politik Islam, tetapi transformasi ekspresi politik ke ruang kultural, simbolik dan jaringan sosial. Namun, penelitian itu masih berada pada level nasional dan belum mengeksplorasi kasus mikro berbasis hubungan historis yang unik seperti hubungan PERSIS & Partai Bulan Bintang. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi tiga ruang kosong dalam literatur yakni kurangnya

³⁰ Tabina, A. S. P., Fahadayna, A. C. & Aminuddin, M. F. (2025). *A Religious Parties and the Construction of Political Identity: A Comparative Study of Indonesia and Türkiye Comparative Study of Indonesia and Türkiye*. JURNAL POLITIK. Vol. 11, No. 1, (30 Oct. 2025).

³¹ Mahendra, S. P., Saudin, B. M., Loeca, H., Al Busthomi, M. Y. (2025). *Islamic Political Communication In The Digital Era: A Study On The Media Social Islamic Mass Organizations of Indonesia: Journal of Political Islam (JOPI)*. Vol. 1, No. 1, (June 2025).

³² Fernando, H. Larasati, Y. G., Abdullah, I., Jubba, H., Mugni, A. & Persadha, P. D., (2023). *The de-existence of Islamic political parties in general elections: A case study of Indonesia as a Muslim-majority country*. Cogent Social Sciences. (25 Jun 2023).

kajian hubungan ormas dan partai dari perspektif kultural, bukan struktural. Absennya penelitian yang menelusuri perubahan hubungan itu secara historis dari fase kedekatan hingga pelemahan dan minimnya studi yang menggunakan teori jaringan sosial dan perubahan institusi untuk membaca dinamika politik lokal berbasis identitas keagamaan.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada ilmu politik Indonesia melalui pendekatan yang lebih sensitif terhadap konteks lokal, memori sosial dan dinamika budaya politik Muslim modernis di Tasikmalaya. Kajian mengenai hubungan agama dan politik di Indonesia terus berkembang, namun pola pembahasannya cenderung mengikuti model relasi struktural, elektoral, atau berbasis legitimasi otoritas ulama tertentu. Sebagian besar penelitian lebih banyak membahas bagaimana organisasi keagamaan mempengaruhi pilihan politik masyarakat melalui struktur formal, forum ulama, pendidikan politik, atau instruksi ideologis. Penelitian ini bukan hanya memotret fakta politik, tetapi menangkap perjalanan sosial dari hubungan yang pernah kuat, kini dipertanyakan masih bertahan sebagai warisan, atau telah berubah menjadi kenangan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana hubungan kultural antara PERSIS dan Partai Bulan Bintang di Kota Tasikmalaya terbentuk dan menguat pada masa lalu?

- 1.2.2. Mengapa dan bagaimana hubungan kultural tersebut mengalami perubahan atau pelemahan hingga pada kondisi sosial-politik saat ini?

1.3.Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Menjelaskan proses terbentuk dan menguatnya hubungan kultural antara PERSIS dan Partai Bulan Bintang di Kota Tasikmalaya pada masa lalu, termasuk faktor-faktor historis, nilai keislaman, serta jaringan sosial yang melatarbelakanginya;
- 1.3.2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perubahan atau pelemahan relasi kultural antara PERSIS dan Partai Bulan Bintang hingga pada kondisi sosial-politik Kota Tasikmalaya saat ini, dengan memperhatikan perkembangan konteks politik, sosial, serta dinamika hubungan antaraktor.

1.4.Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademik

- 1.4.1.1.Memperkaya kajian tentang hubungan ormas Islam dan partai politik, khususnya yang belum banyak diteliti seperti relasi kultural antara PERSIS dan Partai Bulan Bintang di Tasikmalaya;
- 1.4.1.2.Memberi perspektif baru karena sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoroti hubungan formal seperti NU-PKB atau Muhammadiyah-PAN, bukan hubungan berbasis kultur yang historis dan cair;
- 1.4.1.3.Menghadirkan model analisis relasi kultural antara organisasi keagamaan dan partai politik dengan menekankan peran kesamaan identitas dan nilai, memori kolektif, interaksi sosial yang berulang, serta kesukarelaan aktor dalam membentuk dan mempertahankan hubungan di tengah perubahan konteks politik dan sosial;
- 1.4.1.4.Membantu menjelaskan bagaimana identitas keagamaan dan orientasi politik kelompok Islam modernis berubah dalam konteks politik kontemporer;
- 1.4.1.5.Menjadi Rujukan Akademik untuk Penelitian Selanjutnya untuk dijadikan dasar bagi studi lanjutan mengenai dinamika politik lokal, relasi kultur keagamaan dan perilaku politik berbasis jaringan sosial.

1.4.2. Manfaat Praktis

1.4.2.1. Bagi PBB dan PERSIS, penelitian ini dapat membantu kedua pihak memahami apakah hubungan kultural yang pernah kuat masih relevan atau perlu didefinisikan ulang sesuai konteks generasi dan kondisi sosial saat ini;

1.4.2.2. Membantu Penyusunan Strategi Komunikasi Politik Lokal yakni temuan penelitian ini dapat digunakan untuk memetakan pola mobilisasi sosial, preferensi politik komunitas dan faktor-faktor yang memengaruhi kedekatan atau jarak aktor keagamaan terhadap partai;

1.4.2.3. Memberikan Gambaran Realitas Sosial Politik Tasikmalaya bagi Pemerintah Daerah dan menjadi rujukan dalam merancang kebijakan yang sensitif terhadap hubungan sosial-keagamaan dan politik lokal sehingga mencegah polarisasi masyarakat;

1.4.2.4. Membangun Wawasan bagi Pengurus, Kader dan *Jama'ah*, untuk membantu aktor internal PERSIS maupun PBB memahami dinamika perubahan dukungan politik, terutama terkait generasi muda yang lebih cair dalam orientasi politiknya;

1.4.2.5. Menjadi Rujukan bagi Aktivis dan Pengamat Politik Daerah dengan dimanfaatkan sebagai data empiris untuk memahami pola perubahan orientasi politik berbasis kultur Islam modernis di Tasikmalaya.